

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ideologi sebagai wujud representatif hubungan pengetahuan dan relasi sosial manusia merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memahami realita sosial masyarakat dalam kurun waktu tertentu, atau periode historis yang spesifik. Menurut Teun A. Van. Dijk, ideologi merupakan sistem yang terdiri dari ide atau pengetahuan (*ideas*) dan kepercayaan (*belief*), yang sifatnya seringkali dikaitkan untuk melegitimasi kepentingan kelompok, menentang dominasi, dan melambangkan masalah atau kontradiksi sosial.¹ Adanya keterkaitan antara pengetahuan dan relasi sosial masyarakat membuat ideologi menjadi salah satu topik yang penting untuk dikaji lewat disiplin ilmu sosiologi. Penggunaan pendekatan sosiologi tidak hanya berguna untuk menggambarkan makna dan relasi pengetahuan yang terkandung di dalam ideologi, tetapi juga fungsi ideologis-nya di dalam masyarakat. Dalam pandangan Goran Therborn, ideologi berfungsi mentransmisikan 3 tuntutan dasar yang harus dipenuhi masyarakat sebagai organisasi sosial, yaitu: “*apa yang ada*”, “*apa yang benar*”, dan “*apa yang mungkin*”.² Tanpa adanya kualifikasi dan kontekstualisasi 3 tuntutan tersebut yang dikelola secara hegemonik dalam praktik-praktik sosial maka

¹ Teun A. van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach*, (London: SAGE Publications, 1998), hal. 5.

² Goran Therborn, *The Ideology of Power and The Power of Ideology*, (London: Villers Publication, 1980), hal. 18.

stabilitas sosial-politik tidak akan terbentuk.

Karena bentuknya yang abstrak, substansi dan terminologi ideologi pun sering menjadi perdebatan di dunia akademik. Salah satu percutatan klasik yang terjadi ialah di antara ilmuwan yang cenderung mengkaji ideologi berdasarkan prinsip-prinsip politis, dan ilmuwan yang memahaminya berdasarkan praktik-praktik sosial. Dalam penjabaran Mannheim, kasus ini membuat ideologi memiliki dua konsepsi atau status yang berbeda, yaitu: berdasarkan bentuknya (partikuler) dan sifatnya yang spesifik (total).³ Ideologi yang dipahami berdasarkan bentuknya cenderung menyisihkan pola pemikiran individu atau kelompok dengan mekanisme interpretatif yang reaksioner dan pragmatis. Dengan mengedepankan posisi politis, tanpa adanya observasi dan evaluasi, ideologi pada statusnya ini hanya dipahami secara subjektif. Kubu ilmuwan yang menggunakan pendekatan tersebut lebih menekankan bagaimana suatu perilaku individu atau kelompok dapat digenerasilir dan biasa digolongkan ke dalam *kompas politik*. Sedangkan para ilmuwan yang memahami berdasarkan status total, atau lebih tepatnya konteks sosiologi kontemporer, tidak memandang ideologi sebatas definitif politik, seperti liberalisme, Marxisme, konservatisme, radikalisme atau tipologi lainnya. Di dalam sosiologi, ideologi harus dapat diperlakukan sebagai objek penelitian, yang mana didasarkan melalui penelitian terhadap praktik sosial

³ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), terj. Drs. F. Budi Hardiman, hal. 62-75.

masyarakat. Metode ini membuat ideologi diteropong melalui pendekatan relativistis atau relativisme.

Seiring berakhirnya kontestasi perang dingin antara Amerika dan Uni-Soviet dan hancurnya tembok Berlin, memunculkan seutas benang merah yang menjadi momentum historis bagi akhir sekaligus awal baru pemaknaan ideologi. Dikatakan akhir, karena ideologi sebagai prinsip politik telah dianggap tuntas lewat kemenangan Amerika Serikat dalam perang. Sedangkan dikatakan awal, karena munculnya model interpretasi baru terhadap ideologi dari dalam tubuh masyarakat sipil, akibat perlawanan mereka terhadap represifitas negara selama perang. Fenomena ini sendiri membuat hilangnya batas-batas artifisial ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur.⁴ Alhasil, banyak terjadi upaya mencampurkan beragam sistem pengetahuan yang tadinya bersifat konfrontatif menjadi kebijakan suatu negara. Dari aspek ekonomi, suatu negara dapat menjalankan swastanisasi yang menjadi ciri dari sistem perekonomian liberal, sekaligus serikat pekerja yang menjadi gagasan ekonomi sosialis. Ada pun fenomena gerakan sosial baru (*new social movement*) yang membuat perlawanan ideologis terhadap negara dengan gagasan mengenai lingkungan, emansipasi wanita, dan hak asasi manusia. Berbagai irisan tersebut menjadi klaim runtuhnya absolutitas teori dan ideologi-ideologi besar di dunia modern.

⁴ Riza Noer Arfani, Kecenderungan Politik Internasional Kontemporer, *Jurnal UGM*, 1999, Vol. 3, No. 1, hal. 1-5.

Kebutuhan akan restrukturasi negara pasca perang dunia dengan membuka seluas-luasnya dunia akademik, membuat ideologi pun menjadi topik yang diperhatikan. Di ranah ilmu pengetahuan, ada para intelektual dari Mazhab Frankfurt, Neo-Marxisme, Post-Althusserian, dan penganut tradisi kritis lainnya yang berperan menyelamatkan studi terhadap ideologi. Mereka memberikan nuansa baru dengan mengaplikasikan beragam paradigma ilmu pengetahuan lainnya untuk mengkaji model-model baru pengetahuan dan determinasi ideologis yang tumbuh dalam kondisi sosial masyarakat pasca perang dunia. Sehingga kini dapat kita lihat studi terhadap ideologi dilakukan secara multidisipliner, di mana metode psikoanalisis, analisis wacana, dan semiotika merupakan pendekatan yang sangat berguna mempertajam pisau analisis. Korelasi tersebut juga menjadi penyebab banyaknya hasil penelitian seperti produk kebudayaan, gerakan sosial, dan juga isu gender yang membawa variabel ideologi di dalamnya.

Elaborasi ideologi sebagai komponen ketersediaan kultural dan struktural berfungsi membantu implemementasi program pembangunan suatu negara. Ideologi menghubungkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik dalam masyarakat yang general atau universal ke dalam kondisi sosial yang spesifik. Namun, karena adanya upaya rekognisi terhadap konstruksi pemikiran dominan, kepentingan golongan, implementasi praktik yang tidak sesuai dengan interpretasi terhadap ideologi, perubahan mode produksi, identitas kebudayaan, dan tidak relevannya lagi

suatu struktur sosial dalam periode hidup manusia, membuat pertentangan terhadap ideologi pun terjadi.

Salah satu aspek makro yang dapat digunakan untuk mengkaji ideologi adalah aspek ekonomi-politik; di mana studi dilakukan secara kritis terhadap sistem produksi dan perpolitikan suatu negara. Upaya menganalisis ideologi berdasarkan hubungan mode produksi dalam formasi sosial masyarakat adalah metode pengkajian yang lazim dilakukan melalui perspektif Marxis. Dalam konsepsi Marx sendiri, ideologi dipandang sebagai suatu bentuk kesadaran palsu atau ilusi yang terdiri dari kumpulan ide, gagasan, atau wacana yang mendistorsi adanya “perjuangan kelas”.⁵ Salah satu metode penjelasan Marx tentang ideologi ada dalam bangunan metafornya, di mana ia menitikberatkan mode produksi yang terjadi di dalam pasar (basis/infrastruktur), sebagai penentu terakhir apa yang menjadi produk-produk hukum, seni, filosofi, pendidikan, media, politik, dan ideologi dari suatu negara (suprastruktur).

Marx membagi syarat-syarat utama apa saja yang menjadi mode produksi dari basis untuk menjalankan sistem produksi; seperti alat produksi, bahan produksi (materi), pengetahuan dan kemampuan spesifik produksi, dan relasi produksi.⁶ Sedangkan bangunan suprastruktur dibagi lagi menjadi dua level, yaitu: level ideologis, dan level-politis. Kelas mana yang menguasai rantai perekonomian atau yang menyusun ketentuan-ketentuan dalam mode produksi ini lah yang mempunyai

⁵ Terry Eagleton, *Ideology: An Introduction*, (London: Verso, 1991), hal. 3.

⁶ Karl Marx, *A Contribution to The Critique of Political Economy*, (Chicago: Charles H. Kerr Publishing Company, 1904), hal. 12.

kekuasaan untuk mengkonstruksikan kesadaran sosial masyarakat. Untuk memahami bagaimana pembentukan formasi sosial masyarakat, maka diperlukan perhatian terhadap mode produksi yang berjalan.

Setiap formasi sosial selalu dibentuk oleh hubungan antagonistik antar kelas satu dan lainnya. Namun dalam sistem perekonomian kapitalisme yang menjadi bentuk masyarakat modern hari ini, terdapat kecenderungan untuk mereproduksi hubungan-hubungan kontradiktif tersebut menjadi kondisi produksi yang alamiah. Padahal pada kenyataannya kekuatan produktif yang terlibat secara riil dalam mode produksi ini, yaitu: kelas pekerja (buruh), tidak menjadi entitas yang ikut serta mendeterminasi kesadaran sosial tersebut. Dalam mode produksi kapitalisme, kelas pekerja terbelenggu dari eksistensi-nya sebagai agen produksi. Para tenaga kerja ini tidak menikmati nilai lebih (*surplus-value*) dari hasil produksinya selama bekerja, kontradiktif dengan keuntungan yang dinikmati oleh kelas pemilik modal. Eksploitasi di dalam mode produksi seperti ini yang membuat Marx berpandangan bahwa eksistensi manusia sebagai kekuatan produktif dalam struktur sosial masyarakat di era kapitalisme itu terbelenggu. Kelas pekerja sebagai agen utama perekonomian diobjektifikasi dan hidup dalam kesadaran sosial yang didominasi kelas atas.

Maka dari itu, Marx memandang ideologi sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*) yang menjadi tirai besar kelas pekerja untuk melihat realita kelas yang ada. Menurutnya, untuk dapat terlepas dari belenggu ideologi tersebut dan menciptakan kesadaran sosial berdasarkan ekistensinya sendiri, kelas pekerja sebagai kekuatan

produktif yang menggerakkan roda perekonomian harus mengetahui kontradiksi yang terjadi dalam korespondensi antara mode produksi dan relasi produksi yang ada.⁷ Sehingga kondisi antagonisme kelas ini dapat merealisasikan terjadinya revolusi sosial yang akan menghancurkan bangunan basis dan suprastruktur tersebut. Sebagaimana setiap perubahan yang terjadi dari bentuk masyarakat primitif hingga masyarakat kapitalisme. Hancurnya mode produksi dan struktur sosial masyarakat kapitalisme tersebut akan tergantikan oleh mode produksi sosialisme dan ideologi komunisme yang menjadi kesadaran riil dari kelas pekerja.

Konseptualisasi Marx tentang ideologi dan negara melalui hubungan basis-suprastruktur ini dikembangkan oleh para pemikir Marxis dari seluruh penjuru dunia dan proses rekonstruksinya terus berjalan hingga kini. Di Italia, ada Antonio Gramsci yang mengaduk komposisi penjabaran Marx tentang ideologi dengan konsep “hegemoni”. Apa yang dimaksud Gramsci sebagai hegemoni merupakan determinasi ideologis dari struktur dalam wujud pengetahuan yang berfungsi secara kultural. Ada pula Michel Foucault di Prancis yang menawarkan konsep “wacana kekuasaan” atau “diskursus”. Di mana determinasi ideologis dilakukan dengan mengkaitkan relasi pengetahuan “*episteme*” dan kekuasaan dengan medium komunikasi atau bahasa. Dan masih banyak lagi konsepsi pemikiran tokoh yang mengkaji ulang pemikiran Marx tentang korelasi bangunan basis-suprastruktur dan ideologi, selaras dengan dinamika dan fenomena sosial masyarakat di dunia. Perubahan-perubahan tersebut membuat

⁷ *Ibid.*

ideologi tidak lagi dipandang sebagai sebuah struktur pemikiran masyarakat yang ditentukan secara langsung oleh proses produksi dalam basis perekonomian.

Salah satu tokoh Marxis yang berperan penting dalam merekonstruksi pemaknaan ideologi melalui topografi Marx ini adalah Louis Althusser. Ia berhasil membuka jembatan penghubung antara tradisi Marxis klasik dan Post-Marxis dengan konsepnya mengenai ideologi dan negara. Apa yang menjadi penting dari Althusser adalah terkait temuannya mengenai peran level ideologis dalam mempengaruhi efektivitas produksi suatu formasi sosial. Baginya, negara dan ideologi justru menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan formasi sosial masyarakat. Eksistensi formasi sosial kapitalisme tidak hanya ditentukan oleh satu mode produksi (mode produksi industri), melainkan disokong pula oleh mode-mode produksi non-kapitalis yang berada di luar sektor produksi, yaitu lembaga sosial.

Golongan Marxis klasik memandang negara hanya berfungsi melakukan represifitas secara langsung melalui lembaga-lembaganya, seperti pengusiran aksi pemogokkan buruh oleh kepolisian, aksi menembakkan para demonstran, pembubaran agitasi serikat pekerja, dan tindakan lainnya yang melibatkan kontak fisik secara langsung. Pandangan tersebut berasal dari pendapat Marx sendiri yang mengkonsepsikan negara sebagai '*State Apparatus*' (SA).⁸ Althusser menyetujui negara sebagai mesin represif, namun ada bagian luput yang dilupakan para kaum Marxis, bahwa negara juga mempunyai 'level ideologis' yang justru menjadi metode

⁸ Louis Althusser, *On Ideology*, (London: Verso, 2008), hal. 14.

paling efektif dalam melegitimasi proses reproduksi syarat atau ketentuan produksi. Level ideologis ini lah yang dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial negara yang tidak menggunakan metode kekerasan secara langsung.

Althusser mengkategorisasikan lembaga-lembaga negara yang berada dalam level legal-politis dan ideologis menjadi 2 aparatus yang berbeda, yaitu: *Repressive State Apparatuses* atau Aparatus Represif Negara (RSA) dan *Ideological State Apparatuses* atau Aparatus Ideologis Negara (ISA). RSA merupakan kategori yang diisi oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, pengadilan, penjara, tentara, dan lainnya. RSA berperan di ranah publik dan bertindak dengan kontak fisik atau kekerasan, dimana masyarakat sadar akan fungsi dari lembaga ini. Sedangkan ISA merupakan lembaga-lembaga yang berpengaruh melakukan tindakan represif secara tidak langsung atau Althusser menyebutnya “secara ideologis”, yang dampaknya lebih besar di dalam ranah privat. Masyarakat tidak mengetahui secara langsung bagaimana fungsi-fungsi deterministik yang diciptakan oleh ISA. Althusser membagi 7 jenis ISA yang harus diperiksa secara rinci, diuji, dikoreksi, dan diorganisir sebagaimana perkembangan zaman, yaitu: ISA Agama (sistem gereja yang berbeda), ISA Pendidikan (sistem dalam sekolah publik dan privat yang berbeda), ISA Keluarga, ISA Hukum, ISA Politik (sistem politik, termasuk partai politik yang berbeda-beda), ISA Serikat Buruh, ISA Komunikasi (pers, radio, televisi, dan lainnya), dan ISA Budaya (literatur, seni, olahraga, dan lainnya) ⁹

⁹ *Ibid.*, hal. 17.

ISA bekerja secara ideologis, di mana konstruksi ideologi dominan dilegitimasi melalui sistem, objek, wacana pengetahuan, relasi, dan hal lainnya yang diturunkan lembaga sosial kepada masyarakat. Dengan berlangsungnya praktik sosial sehari-hari masyarakat di dalam ISA-ISA yang ada, masyarakat akan mengafirmasi bahwa ideologi yang dilegitimasi negara merupakan hal yang harus mereka terapkan pula.

Menurut Althusser, untuk membuat masyarakat seakan sadar dan menjalankan konstruksi ideologi yang ada, mereka harus dapat menjadi “subjek” peradaban. Proses pembentukan individu menjadi subjek ini ia namakan “*interpellation*”.¹⁰ ISA bertugas untuk menjalankan praktik *interpellation* ini melalui mekanismenya masing-masing. Sekolah melalui metode pembelajaran, televisi melalui *framing* berita, keluarga melalui penanaman moral, dan bentuk-bentuk lainnya yang membuat manusia menjadi subjek yang berfungsi di dalam mode produksi utama. Subjektivikasi inilah yang membuat masyarakat mampu mengetahui bagaimana cara untuk menjadi bagian dari formasi sosial. Tanpa adanya proses transformasi menjadi subjek, suatu konstruksi ideologi tidak dapat dijalankan. Lantai perekonomian kapitalisme baru dapat bergerak, apabila terpenuhinya makna dan tenaga produksi yang dibutuhkan pasar. Maka dari itu, untuk dapat menjamin terjadinya reproduksi syarat produksi tersebut, ISA sebagai mode produksi non-kapitalis, mendeterminasi masyarakat menjadi subjek-subjek yang bernilai dalam suatu formasi sosial, dari luar mekanisme mode produksi utama.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 48.

Sehingga argumen tentang eksploitasi pun tidak akan berkecambuk apabila repesifitas ideologis dari ISA tidak diketahui.

Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai ideologi sudah ada sejak awal kemerdekaan hingga kini. Beberapa di antaranya seperti; perdebatan para *founding fathers* tentang perubahan syariat islam pada sila pertama Pancasila yang tercantum dalam piagam Jakarta. Di mana terjadi diskursus oleh para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Natsir, dan tokoh-tokoh lainnya untuk mengkontekstualisasikan kondisi plural di tengah kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Tak dapat dipungkiri pula hal ini mempunyai keterkaitan sebab-akibat dengan sistem perekonomian masyarakat Indonesia, baik itu kelompok pedagang berbasis identitas keagamaan, sektor agraris, dan industri. Adapun perdebatan Pancasila sebagai konsepsi politis atau ideologi negara antara para ilmuwan dan tokoh bangsa. Di satu sisi ada golongan ilmuwan yang menanggapi Pancasila sebagai sebuah falsafah yang bergantung dengan sistem pemerintahan atau formasi sosial yang ada seperti, Garin Nugroho, Onghokham, Franz Magnis dan lainnya. Sedangkan di sisi lain ada golongan yang mengaggap Pancasila sebagai ideologi yang menjadi aktualisasi dari nilai-nilai kebangsaan, seperti Koentowijoyo, Azyumardi Azra, Budiarto Danujaya, dan lainnya. Adapun perselisihan dalam rangkaian sidang panitia *Ad-hoc* I MPR setelah momentum Reformasi yang bertujuan merubah Pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945 terkait sistem

ekonomi kerakyatan dan pengelolaan SDA¹¹, yang memberi dampak terhadap pengelolaan perekonomian Indonesia, baik itu melalui kebijakan ataupun institusi sosial yang didirikan untuk menunjangnya.

Pentingnya penyesuaian kondisi sosial Negara Indonesia dengan dinamika kehidupan masyarakat global, membuat negara mencetuskan berbagai produk hukum, agenda, dan wacana sebagai konstruksi ideologi yang baru. Tidak hanya dilihat sebagai wacana pasif yang terdiri dari berbagai gagasan atau ide, ideologi eksis dalam relasi sosial yang riil. Salah satu cara memahaminya adalah melalui penelaahan terhadap sistem produksi yang berjalan.

Fungsi pelembagaan ideologi melalui insitisi sosial demi terciptanya formasi sosial yang baru ini dapat dilihat dari berbagai periode pemerintahan. Mulai dari era kepemimpinan Presiden Soekarno (Orde Lama). Mode produksi industri dan agraris masih mendominasi Indonesia di era ini. Di saat Kolonialisme Belanda masih memiliki insititisi sosial dan pengaruhnya terhadap konstruksi “negara-bangsa” Indonesia, pemerintah Orde Lama menggagas transisi formasi sosial dengan mengkorelasikan isu-isu primordial dan anti-imperialisme sebagai mode berpikir masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan diberdayakannya lembaga-lembaga seperti Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), PKI (Partai Komunis Indonesia), tentara, dan institusi sosial masyarakat lainnya untuk dapat menciptakan integrasi dalam melawan sistem

¹¹ AR Pratama, Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *e-journal Unpar*, 2018, Vol. 4, No. 2, hal. 324.

kolonialisme.¹² Slogan Marhaenisme dan NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) menjadi dua butir propaganda yang paling efektif pada masa itu untuk mendekati tiap-tiap kelompok sosial masyarakat yang ada. Reproduksi sosial ini mendapatkan afirmasi dari masyarakat, dengan wacana Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap program pembangunan yang digencarkan.

Begitu pula implementasi yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Munculnya berbagai kooptasi pasar bebas dengan ragam makna dan teknik produksi kapitalistik ke dalam negara (terutama di sektor pertambangan), perdagangan, dan sektor agraris, membuat formasi sosial baru dikelola. Untuk dapat menciptakan transisi formasi sosial, pemerintah diketahui memberlakukan rangkaian agenda, produk, dan wacana, seperti; program P4, Pelita, TAP MPRS 1966, dan serangkaian undang-undang yang mengatur pemilihan dan susunan MPR/DPR.¹³ Sedangkan melalui lembaga sosial seperti sekolah, partai politik, media, lembaga kebudayaan, organisasi masyarakat, serikat buruh, hingga yang paling dikenal; ABRI, memiliki wewenang sebagai penunjang transmisi ideologi dalam struktur pemikiran masyarakat. Dengan terafirmasinya pemikiran masyarakat bahwa negara melancarkan tugasnya berdasarkan ideologi konstitusional (Pancasila dan UUD 1945), berbagai program pembangunan dilakukan.

¹² Benedict Anderson, *Old States, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*, *The Journal of Asian Studies*, 1983, Vol. 42, No. 3, hal. 485.

¹³ David Bouchier, Vedi R. Hariz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006), hal. 129-134.

Pada periode kita hidup saat ini, wajah ideologi ekonomi-politik Indonesia dan bentuk formasi sosial-nya memiliki hubungan dengan peristiwa historis yang terjadi 20 tahun silam. Era reformasi menjadi dentung perubahan arah perekonomian negara dengan diterapkannya model perekonomian perbankan, dan munculnya ide-ide pembangunan post-strukturalis. Hancurnya perekonomian Indonesia pada krisis moneter 1998, membuat negara membuka lebar pintu bantuan dari WTO (*World Trade Organization*) dan IMF (*Indonesian Monetary Fund*). Dengan mengamini *Washington Consensus*, negara-negara yang berutang saat itu (termasuk Indonesia) diharuskan menerapkan kebijakan penyesuaian struktural (SAP) yang disusun oleh institusi-institusi di Washington.¹⁴

Munculnya berbagai kebijakan negara dan praktik-praktik dalam lembaga sosial yang mempermudah investasi pasar dalam ruang publik, membentuk ketentuan-ketentuan mode produksi utama dapat dilaksanakan. Gejala sosial ini seringkali dikaitkan dengan representasi cara hidup masyarakat abad 21, yaitu: neo-liberalisme. Sebuah gagasan yang menjadi pedoman pengelolaan negara-negara di dunia, dalam fase kapitalisme akhir (*Late Capitalism*). Menurut Foucault, neo-liberalisme merupakan cara seluruh kekuatan politik dapat dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pasar.¹⁵ Dengan adanya pemerintah sebagai legislator dan pemilik modal yang menguasai pasar sebagai ranah produksi, membuat suatu eksploitasi kelas dapat

¹⁴ Darmaningtyas, Edi Subkhan, dan Fahmi Panimbang, *Melawan Liberalisme Pendidikan*, (Malang: Madan, 2014), hal. 2.

¹⁵ Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the college de France*, (London: Pelgrave Macmillan, 1978), hal. 131.

terdistorsi dengan adanya hukum. Determinasi ideologis baik di ruang publik dan privat dengan metode “pembelajaran”, “pemahaman”, dan “pelaksanaan” berbasis mekanisme pasar ini yang memungkinkan negara menghasilkan karakteristik subjek yang dibutuhkan oleh pasar. Subjek neoliberal adalah individu yang secara moral bertanggung jawab untuk menavigasi ranah sosial menggunakan pilihan rasional dan perhitungan biaya-manfaat yang didasarkan pada prinsip-prinsip berbasis pasar dengan mengesampingkan semua nilai etika dan kepentingan sosial lainnya.¹⁶

Gejala sosial tersebut berlanjut dan menjadi ciri dalam pengelolaan pembangunan Indonesia hingga kini. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo gejala sosial ini ada di dalam wacana *revolusi industri 4.0*, di mana mekanisme produksi berjalan dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis data hari ini, seperti Tokopedia, Shopee, GO-JEK, BukaLapak atau biasa disebut *start-up Unicorn*. Indeks efektivitas pasar yang bergantung pada karakteristik SDM berprinsip praktis, otomatisasi, pragmatis, dan kalkulabilitas mendistorsi kesenjangan sosial antara pekerja dan pemilik modal. Hal tersebut ditunjang pula oleh negara melalui reproduksi hukum yang mempermudah kinerja pasar dan investasi pemilik modal baik secara langsung atau pun tidak langsung. Di bidang pendidikan produk hukum itu tertuang dengan pembentukan Kemenristekdikti (Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia) dan Perpres No.10 tahun 2016 yang di dalamnya mengutamakan proses

¹⁶ Trent H. Hamann, Neoliberalism, Governmentality, and Ethics, *Foucault Studies*, 2009, Vol. 1, No. 6, hal. 37.

pendidikan dengan aspek teknologi dan stabilitas negara untuk menjawab kebutuhan pasar. Hingga tahun 2019 langkah-langkah tersebut secara bertahap masuk ke dalam wacana revisi 74 Undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan indeks efektivitas pasar.¹⁷ Ketentuan jam kerja, alat produksi, relasi produksi, dan spesialisasi di bidang kerja yang padat ini menjadi gambar *human capital* abad 21. Sehingga jika dikaji secara kritis, agenda jangka panjang pembangunan Negara Indonesia sejatinya masih dikuasai oleh konstruksi ideologi dominan, yaitu menurut para elit politik dan pemilik modal.

Dengan mekanisme yang dijelaskan Althusser dan gambaran kehidupan kontemporer ini ini, maka formasi sosial masyarakat di era kapitalisme; baik itu teknik, nilai, dan interaksi sangat dipengaruhi oleh logika pasar. Pratik-praktik tersebut membuat tenaga kerja mempunyai kemampuan atau *skill* yang dibutuhkan oleh pasar. Pasar akan semakin mempunyai ketersediaan jumlah pekerja yang mampu berfungsi menggerakkan roda perekonomian. Sebagaimana yang dikutip Althusser dari perkataan Marx, bahwa “suatu formasi sosial yang tidak mereproduksi kondisi produksi saat proses produksi berlangsung, tidak akan dapat bertahan hingga satu tahun.”¹⁸ Sehingga setiap periode, zaman, era, atau kondisi hidup masyarakat mempunyai pola reproduksinya masing-masing dengan campur tangan lembaga sosial. Periodisasi

¹⁷ Diakses melalui situs <https://money.kompas.com/read/2019/09/16/174440626/dongkrak-investasi-jokowi-akan-revisi-74-undang-undang>, tanggal 10 September 2019, pukul 22.02 WIB.

¹⁸ Louis Althusser, *Op. Cit.*, hal. 1.

inilah menjelaskan bahwa suatu masa mempunyai gejala sosial spesifik dalam mode produksinya masing-masing.

Demi memahami konsepsi ideologi dan negara serta korelasinya secara sosiologis dalam masyarakat, diperlukan suatu upaya penelitian untuk memperkaya pengetahuan tentang ini. Salah satunya ialah dengan mengkaji pemikiran Louis Althusser. Maka dari itu, peneliti akan menelaah bagaimana konseptualisasi Louis Althusser tentang ideologi dan negara, dan relevansinya terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini secara sosiologis. Namun, hal tersebut tidak menutupi peneliti untuk menggunakan berbagai konsep ilmiah lainnya yang bermanfaat bagi penelitian ini.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, penelitian ini ingin mengkaji pandangan Louis Althusser terkait ideologi dan negara beserta korelasinya dengan kehidupan kontemporer di Negara Indonesia yang masih direproduksi dengan konstruksi ideologi dominan dari kelas atas, Sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih fokus dan merinci untuk dijelaskan. Maka, permasalahan penelitian yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Louis Althusser tentang ideologi dan negara?
2. Sejauh mana konstruksi pemikiran tersebut relevan untuk konteks Indonesia pasca-Orde Baru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat di tentukan poin yang menjadi fokus penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Memaparkan konsepsi ideologi dan negara dalam pemikiran Althusser.
2. Menjelaskan relevansi konsepsi ideologi dan negara Althusser dalam formasi sosial masyarakat Indonesia kontemporer.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah sumber pengetahuan untuk studi-studi literatur dan penelitian yang telah ada.
2. Memperkaya kajian-kajian yang menggunakan disiplin ilmu sosiologi dan analisis sosiologis, terutama sub-disiplin sosiologi pengetahuan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, di antaranya:

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk melihat bagaimana mekanisme produksi dalam suatu negara dapat berjalan dengan adanya pengaruh dari aparatus ideologi negara melalui disiplin ilmu sosiologi.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian sejenis.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memajukan Negara Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami kerangka pemikiran Louis Althusser.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi ilmu sosiologi dalam memahami fenomena sosial yang ada.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dari metode penelitian kualitatif menekankan prosedur penelitian yang berlangsung harus dapat mengamati fenomena secara menyeluruh. Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁹ Sehingga, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti berdasarkan analisisnya.

1.5.2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka atau studi literatur (*library research*), di mana penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian dilakukan dengan studi terhadap

¹⁹ Pupu Saepul Rahmat, Pendekatan Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, 2009, Vol. 5, No. 9, hal. 2.

pemikiran tokoh dan mengkorelasikannya dengan fenomena sosial yang ada. Penelitian dilakukan dengan penelusuran terhadap buku, jurnal, *e-book*, *e-journal*, koran, skripsi, dan sumber - sumber literatur lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan peneliti hasil penelaahan yang komperhensif melalui teks-teks yang menjadi sumber kepustakaan. Pengambilan data dilakukan dengan 2 sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer berasal dari karya tulis Louis Althusser sendiri, beberapa diantaranya adalah "*Lenin and Philosophy and Other Essay*", "*For Marx*", "*Reading Capital*", "*On Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses*, dan "*On Ideology*". Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur-literatur lain yang menelaah pemikirannya dan berkaitan dengan topik ideologi dan negara.

Sedangkan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik dan metode analisis wacana (*discourse analysis*). Dalam teknik analisis ini, wacana dipandang sebagai struktur cerita yang bermakna atau sebuah bentuk sajian yang memuat satu ataupun lebih gagasan dengan menggunakan bahasa (verbal dan nonverbal).²⁰ Analisis wacana digunakan untuk mengkaji secara mendalam korelasi antara bahasa dan realitas.

Adapun penggunaan metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/ CDA*) dalam penelitian ini. Menurut Norman Fairclough, analisis wacana kritis merupakan suatu metode ilmiah yang memandang, mengkaji, dan menjelaskan

²⁰ Ibnu Hamad, Lebih Dekat dengan Analisis Wacana, *Jurnal Mediator*, 2007, Vol. 8, No. 2, hal. 326.

bahasa sebagai bagian materiil integral dalam suatu proses sosial.²¹ Dalam penjabaran Fariclough, analisis wacana kritis harus dapat digunakan untuk memvisualisasikan (*semiosis*) interkoneksi antara bahasa dengan isu dalam praktik sosial (*social practice*) yang diteliti, baik itu budaya, politik, ekonomi, dan lainnya. Penggunaan CDA sendiri dalam penelitian sosial berfokus terhadap tindakan atau pun struktur sosial. Sehingga penggunaan CDA dalam penelitian sosial menyangkut 3 tahapan, yaitu: deskripsi (*text analysis*), interpretasi (*processing analysis*), dan penjelasan (*social analysis*).²² Bahasa dalam pandangan analisis wacana kritis dipahami sebagai medirum hegemonk yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Bahasa dalam analisis wacana kritis dipandang sebagai medium kekuasaan dominan dalam konteks sosio-politik. Oleh karena itu, analisis wacana kritis dapat dipakai untuk membongkar kuasa yang ada di dalam setiap proses bahasa: batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, dan topik apa yang dibicarakan. Lebih khusus lagi, analisis wacana kritis adalah jenis penelitian analisis-wacana yang mempelajari cara ideologi, identitas dan ketidaksetaraan diberlakukan melalui teks-teks yang dihasilkan dalam konteks sosial dan politik. Teknik analisis ini bermanfaat untuk mengkaji dan mengkorelasikan lebih dalam realitas yang terkandung dalam suatu wacana, terhadap konteks sosial yang ada.

²¹ Ruth Wodak, dan Michael Meyer, *Methods of Critical Analysis Discourse*, (London: SAGE Publications, 2001), hal. 121-123.

²² *Ibid.*

Dengan ini, apa yang dianggap peneliti sebagai wacana adalah representasi dari realitas kekuasaan yang ada.

Adapun peneliti menggunakan metode hermeneutika sebagai teknik analisis untuk mengeksplorasi dan menjabarkan literasi yang digunakan dalam konsepsi ideologi dan negara dalam pemikiran Louis Althusser. Menurut Schleiermacher, hermeneutika merupakan suatu ilmu pengetahuan filosofis untuk memahami segala macam interpretasi tekstual dan historis.²³ Perbedaan sikap hermeneutika secara ilmiah dan dogmatis terletak pada posisi peneliti sebagai subjek yang memandang objek dari luar sebagai bentuk refleksi, bukan keterlekatan di dalam; peneliti dituntut untuk mempunyai kredibilitas, ketelitian, dan perilaku etis dalam proses penelitian.²⁴ Penggunaan metode hermeneutika dalam penelitian berfungsi untuk menafsirkan fenomena dengan suatu penilaian. Sedangkan menurut Aylesworth dalam metode lingkaran hermenutik; hermeneutika juga bertujuan untuk menghubungkan pemahaman masa lalu, sekarang, dan masa depan melalui dialog yang terkandung antara teks dan pembaca.²⁵

²³ Don Ihde, *Expanding Hermeneutics: Visualism in Science*, (Evanston: Northwestern University Press, 1999), hal. 12.

²⁴ Margo Peterson, Joy Higgs, Using Hermeneutics as a Qualitative Research Approach in Professional Practice, *The Qualitative Report*, 2005, Vol. 10, No. 2, hal. 352.

²⁵ *Ibid.*, hal. 346.

1.6. Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian terkait topik mekanisme lembaga negara dalam mereproduksi formasi sosial secara ideologis sudah banyak dilakukan oleh berbagai penelitian internasional. Namun, penelitian terhadap konsepsi pemikiran tokoh yang mencetuskan pandangannya terhadap ideologi dan negara masih belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia. Adapun suatu kecenderungan penggunaan paradigma positivistik di Indonesia dalam mengkaji korelasi ideologi dan negara sebagai suatu fenomena sosial. Begitupula dari 3 perspektif sosiologi yang dapat digunakan sebagai alat analisis (struktural-fungsional, konflik, dan interaksionisme simbolik), pengaplikasian perspektif konflik masih kurang diminati. Maka dari itu penelitian ini menggunakan tinjauan penelitian sejenis sebagai contoh dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan studi penelitian seperti ini.

Dalam penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti. **Penelitian pertama** yang digunakan adalah buku yang merupakan hasil disertasi dari Wijaya Herlambang dengan judul “*Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film*”.²⁶ Buku ini membahas perihal bagaimana peran, fungsi, dan metode elit negara dan para budayawan dalam mereproduksi formasi sosial masyarakat Indonesia terhadap unsur-unsur Komunisme. Hasil temuan penelitian menjelaskan mekanisme

²⁶ Wijaya Herlambang, *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2015), hal. 1.

pelembagaan pemikiran masyarakat Indonesia terkait kekerasan yang terjadi pada tahun 1965 hingga kini, melalui produk-produk kebudayaan seperti film, koran, majalah, cerpen, film, buku, dan lainnya. Dalam kerangka teoretis, peneliti menggunakan teori aparatus ideologi negara dari Louis Althusser, teori kekerasan Johan Galtung, dan teori kekerasan linguistik menurut William Gay dan Gorveski. Adapun penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis wacana.

Penelitian kedua yang digunakan sebagai tinjauan penelitian sejenis adalah buku dari Slavoj Zizek yang berjudul “*The Sublime Object of Ideology*”.²⁷ Dalam penelitian ini Zizek membahas bagaimana produk-produk kebudayaan seperti film, novel, cerpen, atau bahkan folklor dipandang sebagai suatu objek yang mengemban erat nilai-nilai ideologis. Hal tersebut digunakan penulis untuk menggambarkan realita kehidupan sehari-hari dan pengaruhnya terhadap pembentukan agen sosial atau subjek. Secara garis besar, penulis menuangkan kritiknya secara transdisipliner terhadap berbagai sistem ideologi besar seperti kapitalisme, feodalisme, imperialisme, komunisme, liberalisme dan lainnya. Dalam kerangka teoretis, penelitian ini menggunakan psikoanalisis Jacques Lacan, filsafat Hegel, teori ideologi Marxis, imperialisme kategoris Immanuel Kant, serta konsep-konsep ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi

²⁷ Slavoj Zizek, *The Sublime Object of Ideology*, (London: Verso, 1989), hal. 1.

pustaka. Ada pun analisis data menggunakan metode analisis wacana kritis serta hermeneutika.

Tinjauan **penelitian ketiga** menggunakan hasil penelitian dari Goran Therborn dengan judul “*The Ideology of Power and The Power of Ideology*”.²⁸ Dalam buku ini Therborn berusaha memberikan pemahaman berlebih kepada pembaca tentang konsep intereplasi dan aparatus ideologis negara dari Louis Althusser. Melalui disiplin ilmu sosiologi dan psikoanalisis, penulis menjelaskan bahwa fenomena ketimpangan sosial antara masyarakat dan negara tidak hanya ada di dalam spektrum ekonomi-politik. Hal tersebut dikarenakan proses reproduksi agen produksi atau subjek yang ada nyatanya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi syarat-syarat produksi atau industri saja.

Adapun penulis menemukan *axis existensial* (menjadi bagian dari makna) dan *historical* (menjadi bagian dari relasi sosial) untuk menjelaskan bagaimana reproduksi ketimpangan sosial lewat dimensi subjektivitas dapat dijalankan. Penulis juga mengembangkan proses subjeksi lewat konsep diskursus Foucault dan subjeksi dari Althusser untuk menciptakan formulasi baru terhadap ideologi, yaitu *inclusive* dan *positional*, yang mana setiap jenis diskursus dominan ia kategorisasikan secara beririsan satu sama lain. Adanya kekuatan sosial dominan di tengah masyarakat menjelaskan bahwa ada pula subjeksi-subjeksi lainnya yang lebih privat seperti moral, identitas kesukuan, hingga orientasi seksual. Ada pula perkembangan fenomena

²⁸ Goran Therborn, *Op. Cit.*, hal. 1.

gerakan sosial di dunia hari ini yang menyebabkan isu publik tidak hanya berputar dalam masalah ekonomi, tapi juga lingkungan dan rasisme. Karena itu, sebuah formasi sosial masyarakat tidak hanya dapat dipandang lewat mode-mode produksi ekonomi, tetapi juga faktor ketimpangan sosial lainnya yang ada.

Therborn menjelaskan bahwa fleksibilitas masyarakat hari ini menjadi tanda bahwa kategorisasi-kategorisasi yang dilegitimasi negara dapat ditentang oleh kekuatan alternatif masyarakat. Therborn menjelaskan kekuatan sosial tersebut dalam terminologi "*counter apparatuses*". Sebuah kekuatan alternatif, yang tidak hanya berkuat dalam orientasi masyarakat sipil ataupun, tapi juga dapat memasukkan seluruh kelompok sosial ke dalamnya untuk menentang kualifikasi-subjeksi yang dideterminasikan oleh negara.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis wacana dan hermeneutika untuk menghasilkan penelitian yang baru. Adapun penulis mencoba menganalisis secara naratif dan historis-komparatif dalam penelitian ini. Penelitian juga menggunakan beragam disiplin ilmu, walaupun latar belakang penelitian ini menegaskan pondasinya dalam ranah sosiologi. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan menggunakan metode transdisipliner dalam menjelaskan fenomena sosial yang ada.

Penelitian juga menggunakan buku dengan judul *Global Neoliberalism and Education and its Consequences*²⁹ yang dipublikasikan oleh David Hill dan Ravid Kumar sebagai **penelitian keempat**. Di dalam buku ini terdapat berbagai penjelasan mengenai bagaimana fenomena neoliberalisme dan paradigma pembangunan global dapat diimplementasikan ke berbagai negara melalui medium pendidikan. Lewat penelaahan secara kritis, terdapat sebuah alur yang jelas mengenai pola reproduksi kapitalisme, dan praktik-praktik sosial spesifik yang berkaitan dengan ranah pendidikan untuk melegitimasi formasi sosial negara, baik itu dengan mekanisme sifat represif-legal, represif-langsung, dan tentunya yang membuat kekuasaan negara dapat disembunyikan, yaitu: represif-ideologis.

Dalam tinjauan penelitian sejenis, penelitian ini juga menggunakan jurnal nasional sebagai referensi. Jurnal nasional pertama yang digunakan adalah hasil penelitian dari Karti Soeharto pada tahun 2013 yang berjudul: “*Analisis Interpretasi Elit Pendidikan Indonesia tentang Ideologi Pendidikan Nasional*”.³⁰ **Penelitian kelima** ini mengangkat UU No. 20 tahun 2003 yang meliputi: landasan, kurikulum, dan manajemen pendidikan nasional sebagai objek penelitian yang diinterpretasikan oleh para elit pendidikan Indonesia. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil, bahwa secara kategorisasi ideologi, pendidikan Indonesia berada dalam rumpun ideologi liberal kompromistik dan konservatif revisionis. Dalam kerangka teoretis,

²⁹ David Hill, dan Ravid Kumar, *Global Neoliberalism and Education and its Consequences*, (London: Routledge, 2009), hal. 1.

³⁰ Karti Soeharto, Analisis Interpretasi Elit Pendidikan Indonesia tentang Ideologi Pendidikan Nasional, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2010, Vol. 17, No. 1, hal. 68.

penelitian menggunakan teori elit pendidikan dari Robert D. Putnam dan teori ideologi pendidikan dari O'Neill. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan perspektif proses. Ada pun teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis logika rasional, analisis wacana, dan semantis-kemaknaan.

Untuk tinjauan **penelitian keenam**, digunakan hasil penelitian dari Agus Wahyudi yang berjudul "*Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komperhensif atau Konsepsi Politis?*".³¹ Tulisan ini membahas tentang permasalahan status Pancasila sebagai ideologi atau konsepsi politis berdasarkan pemahaman kalangan ilmuwan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data studi pustaka dan analisis data yang digunakan ialah hermeneutika dan semantis-kemaknaan. Sedangkan dalam perspektif, penelitian ini menggunakan perspektif proses, dimana ideologi ditelaah secara kontinu dari masa pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya berdasarkan wacana dari para ilmuwan.

Dalam penelitian ini, penulis membuat pembabakan dua model interpretasi para ilmuwan terhadap Pancasila melalui dua konsepsi, yaitu konsepsi natural dan kritis. Para ilmuwan yang menganggap Pancasila sebagai ideologi berpendapat bahwa Pancasila dibentuk berdasarkan pemahaman subjek yang memandang realita hidup (baik itu dalam bentuk ide ataupun materi) sebagai hal yang alamiah, dan terbentuk secara natural tanpa pengaruh dan dominasi orang lain. Sedangkan para ilmuwan yang

³¹ Agus Wahyudi, *Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komperhensif atau Konsepsi Politis?*, *Jurnal Filsafat*, 2006, Vol. 16, No. 1, hal. 94.

menganggap Pancasila sebagai konsep kritis, memandang bahwa ideologi merupakan bentuk subjektivasi dari suatu kelas dominan terhadap kelas lainnya, untuk menciptakan kondisi sosial yang diinginkan.

Peneliti menarik 3 poin yang menjadi karakteristik Pancasila berdasarkan pembabakan pandangan ilmuwan yang masuk dalam konsep kritis dan kritis natural yang menjadi hasil penelitian penulis. Pertama, Pancasila sebagai konsepsi politis tidak identik dengan Pancasila sebagai konsensus politik. Pancasila tidak tepat dikatakan sebagai kontrak sosial karena terdiri dari rumpun-rumpun nilai yang berbeda dan terdapat beberapa kontradiksi antar poin satu dan lainnya oleh kelompok sosial masyarakat. Bukan karena teori kontrak sosial sendiri problematis, tetapi juga pembentukan Pancasila sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat kontrak sosial. Hal ini diperlukan untuk menjauhkan Pancasila hanya boleh dipahami berdasarkan kerangka berpikir satu kelompok.

Kedua, hubungan antara tindakan privat dan tindakan publik dalam konteks Pancasila sebagai konsepsi politis perlu mendapat penjelasan sendiri. Baik itu individu dalam ranah privat dapat mengaktualisasikan Pancasila yang berbeda sebagai wujud aktualisasi publik. Masing-masing subjek harus mampu diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam tindakan sosialnya.

Ketiga, Pancasila sebagai konsepsi politis yang mengatur hak-hak sipil dan kebebasan politik bagi warga negara yang hidup dalam sebuah negara, untuk memperkuat gagasan fundamental Pancasila sebagai dasar Negara. Baik itu masyarakat

sipil, lembaga sosial, pemerintahan, dan lainnya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Pancasila dalam pemahamannya sendiri. Subjek harus diberikan kebebasan menginterpretasikan Pancasila berdasarkan proses objektivitasnya masing-masing. Hal ini berguna agar Pancasila tidak menjadi dogma hidup kenegaraan Indonesia dalam praktik-praktik yang bersifat vertikal.

Penelitian ketujuh menggunakan hasil penelitian dari Abdul Kodir dengan judul “*Corporate Social Responsibility (CSR), Ideologi, dan Keberpihakan di Indonesia: Telaah Teori Kritis Mazhab Frankfurt*”.³² Dalam penelitian ini penulis berusaha mengidentifikasi gejala sosial modernitas dengan adanya dwifungsi CSR lewat dua paradigma keilmuan, yaitu paradigma positivistik dan paradigma kritis. Adanya CSR di Indonesia menghadirkan sebuah polemik di tengah masyarakat, karena selain CSR sebagai dipandanga sebagai medium pembangunan negara dengan masyarakat, ternyata ia juga membantu proses legitimasi kerangka berpikir kelas penguasa. Melalui analisis teori kritis dari Frankfurt, penulis mengkorelasikan berbagai kasus di Indonesia seperti pertentangan masyarakat daerah dengan perusahaan-perusahaan besar seperti: PT. Freeport, PT. Timah. TBK ataupun PT. Newmont Minahasa Raya. Dengan munculnya kekuatan sosial baru seperti CSR, ternyata negara dan perusahaan menerapkan program-program CSR sebagai mekanisme formalitas untuk menormalisasi ketimpangan atau kontradiksi yang ada antara masyarakat dengan

³² Abdul Kodir, *Corporate Social Responsibility (CSR), Ideologi, dan Keberpihakan di Indonesia: Telaah Teori Kritis Mazhab Frankfurt*, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2016, Vol. 1, No. 2, hal. 149.

negara. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana dengan kerangka teori kritis Frankfurt. Adapun penelitian menggunakan konsep ideologi, *civil society*, dan juga tanggung jawab organisasi sosial.

Penelitian kedelapan menggunakan jurnal internasional yang ditulis oleh Benedict Anderson dengan judul “*Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*”.³³ Dalam penelitian ini penulis mengkaji berbagai macam lembaga sosial (aparatus) beserta metode, baik yang pernah dan masih ada di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses reproduksi formasi sosial di Indonesia dan model masyarakat yang terbentuk oleh mekanisme tersebut dari masa pra-kemerdekaan hingga orde baru. Dalam kerangka teoretis, penelitian ini menggunakan berbagai teori ideologi, salah satunya adalah teori aparatus ideologi negara Louis Althusser. Metode penelitian diterapkan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengambilan data studi pustaka. Sedangkan model analisis data yang digunakan adalah historis-komparatif.

Setelah jurnal, berikutnya ada pula **penelitian kesembilan** dalam bentuk tesis dari Catherine Elizabeth Thomas yang berjudul “*The Haunted University: Academic Subjectivity in The Time of Communicative Capitalism*”. Tulisan ini menginvestigasi bagaimana politisasi para elit terhadap budaya teknologi di universitas, dalam mendukung konstruksi ideologi neoliberalisme pada abad 21. Penulis melihat fenomena ini berdasarkan perubahan kultur akademik dan kemampuan yang harus

³³ Benedict Anderson, *Op. Cit.*, hal. 477.

dimiliki oleh para pelajar demi keberlangsungan studinya. Penelitian juga menarik bagaimana perkembangan wacana pelajar sebagai “subjek ideologis” ini di universitas-universitas Inggris dan negara-negara lain di dunia. Dalam tesis ini, penulis menggunakan konstruksi teoritis yang terdiri dari penggabungan akan psikoanalisis Freud dan teori ideologi Althusser. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tesis ini adalah kualitatif, dengan teknik pengambilan data studi pustaka dan teknik analisis wacana kritis kritis serta historis komparatif terhadap objek penelitian yang meliputi: halaman dan *blog* universitas, literasi-literasi tentang sejarah pendidikan, dan juga sedikit wawancara terhadap staf akademik kampus.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diskursus pendidikan pada abad 21 telah mengganti sistem-sistem pendidikan dalam universitas yang notabene dikukung oleh dogma-dogma para agamawan yang secara tipologi ideologi dinamakan konservatif, menjadi mekanisme ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi perekonomian industri dan lebih bersifat liberal. Di Inggris sendiri, universitas Oxford dan Cambridge atau biasa disebut ‘*Oxbridge*’ merupakan salah satu paradigma pendidikan yang telah diuniversalisasikan menjadi sistem pendidikan nasional oleh berbagai negara. Dengan hadirnya internet, sistem belajar mengajar dapat dibuat menjadi praktis. Temuannya dimulai dengan keharusan pemakaian blog dan website di ruang akademik, karena dampak dari tingginya penggunaan di masyarakat pada tahun

³⁴ Catherine Elizabeth Thomas, *The Haunted University: Academic Subjectivity in The Time of Communicative Capitalism*, (Brighton: University of Sussex, 2015), hal. 24.

2006 di berbagai Oxbridge dan universitas lainnya di Eropa. Hal ini dipicu dengan alasan bahwa blog dan website dapat mempermudah profil universitas dan mahasiswa yang berada dalam ruang akademik. Maka dari itu, para mahasiswa diharuskan untuk dapat membuat dan menggunakan blog seefektif mungkin pada proses pembelajaran. Begitupula *powerpoint*, tatkala penjelasan di papan memakan waktu lama dan dapat menciptakan beberapa kesalahan, *powerpoint* digunakan dalam ruang kelas sebagai alat bantu mahasiswa dan dosen dalam presentasi. Fenomena *website*, *powerpoint*, dan *blog* selaku fitur teknokultural, menjadi metode-metode yang relevan digunakan universitas untuk dapat mereproduksi subjek yang berfungsi bagi formasi sosial. Kultur ini ternyata dapat menciptakan subjek yang bernilai bagi pasar. Subjek yang coba dibentuk kapitalisme pada abad 21 dengan memanfaatkan ruang pendidikan adalah subjek yang komunikatif (*communicative capitalism*). Subjek yang membawa sikap pragmatis, individualistik, dan berorientasi teknis. Menurut penulis, digital dalam dunia pendidikan merupakan "*The Symbolic*" yang coba diaplikasikan untuk menjadi wadah dari objek-objek yang representatif untuk akademisi yang ada di dalamnya.

Di dalam kehidupan personal, masing-masing akademisi mempunyai *blog* dan *website*-nya masing-masing, yang mana mereka kelola untuk merepresentasikan diri mereka yang "personal", baik itu film kesukaan, genre musik, motto, makanan, dan lain-lainnya. Sedangkan di dalam universitas mereka sejatinya berhadapan dengan diri mereka yang lain atau "*the other*", dikarenakan *blog* dan *website* itu mempunyai ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh hierarki yang lebih tinggi. Mereka

menggunakan blog dan website dengan mencantumkan prestasi yang mereka punya, keahlian, dan tentunya dengan struktur halaman yang formal. Begitupula penggunaan *powerpoint* yang dijelaskan penulis dari garis, warna tampilan, hingga fungsi untuk melatih kecakapan bicara secara formal. Seluruh proses-proses dalam universitas ini sangat efektif untuk menciptakan subjek-subjek yang berguna dengan kondisi pasar. Sehingga pasar tidak akan kehilangan berbagai tenaga kerja ahli di berbagai bidang untuk menggerakkan roda perekonomian kelas atas. Maka mata rantai kapitalisme tersebut tidak akan hilang dikarenakan penggunaan struktur bahasa dan budaya teknokratik itu masih dikelola oleh kelas atas. Dengan ini, universitas di abad 21 pun merupakan aparatus yang mereproduksi subjek-subjek yang dapat mewujudkan konstruksi ideologi kelas atas.

Untuk **penelitian kesepuluh** terdapat disertasi dari Chaterine Jean Chaput yang berjudul "*Inside the teaching machine: The United States public research university, surplus value, and the political economy of globalization*".³⁵ Penelitian ini membahas peran universitas sebagai institusi yang menunjang berjalannya sirkulasi sistem perekonomian kapitalisme di Amerika Serikat dan dampaknya sebagai paradigma pendidikan secara global. Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini meliputi berbagai hasil penelitian publik dari universitas-universitas di Amerika Serikat yang telah dijadikan regulasi negara, seperti: *Morril Land Grant-Act* (UU hibah tanah) dan

³⁵ Chaterine Jean Chaput, *Inside The Teaching Machine: The United States Public Research University, Surplus value, and The Political Economy of Globalization*, (Tuscallosa: University of Alabama Press, 2008), hal. 1.

GI Bill Serve. Penelitian ini menggunakan teori aparatus ideologi negara dari Louis Althusser sebagai landasan teoretis. Sedangkan dalam metode, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengambilan data studi pustaka dan analisis wacana.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata institusi pendidikan tinggi dapat digunakan untuk mendorong konstruksi ideologi pemerintahan dari bentuk wacana, menjadi produk hukum. Kapitalisasi ranah pendidikan dan penggunaan riset untuk mendukung transformasi budaya tradisional menjadi modern sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu di Amerika Serikat.

Produk-produk paling awal yang digunakan dalam rangka menciptakan suatu formasi sosial yang menguntungkan para pemilik modal ini adalah *Moriil Land Granct-Act* (UU hibah tanah) dan *GI Bill Serve*. Tujuan awal dari penggunaan metode ini adalah untuk merubah diferensiasi sistem agrikultural antar masyarakat barat dan eropa tengah yang mendiami pedesaan untuk menjadi suatu kesatuan sistem dibawah legalitas hukum Amerika Serikat.

Namun, semakin berpengaruhnya produk hukum dalam mengatur tatanan masyarakat, semakin bertambah pula wacana-wacana lain dari pihak negara. Sehingga penggunaan berbagai produk hukum yang dianggap terverifikasi karena adanya “riset” mulai merambah dari lokal ke arah nasional, dan bahkan internasional dalam wacana modernisme a la Amerika Serikat. Pada hari ini metode itu pun diterapkan dengan adanya berbagai lembaga internasional yang digunakan Amerika Serikat sebagai

penunjang globalisasi dan universalisasi suatu ideologi melalui ranah pendidikan, beberapa di antaranya adalah World Bank dan IMF. Dengan perubahan berbagai sistem pendidikan dan pengaplikasian riset dalam wacana “peningkatan mutu”, ternyata tersimpan banyak agenda pembangunan berlandaskan neoliberalisme dan sistem kapitalisme yang mengakomodir kepentingan golongan elit.

Tabel 1.1.

Tabel Perbandingan Pustaka

| No. | Judul | Peneliti | Jenis Penelitian | Teori/Konsep | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|-------------------|------------------|---|--|---|
| 1. | Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film (Buku) | Wijaya Herlambang | Kualitatif | Teori Kekerasan Johan Galtung, Teori Kekerasan Linguistik William Gay dan Ellen Goverski, Teori Aparatus Ideologis Negara Louis Althusser | Membahas mekanisme negara dalam melegitimasi suatu konstruksi sosial dominan ke dalam praktik sosial masyarakat. | Studi yang dilakukan lebih berfokus kepada produk-produk kebudayaan seperti sastra, cerpen, novel, dan film dalam menjelaskan determinasi ideologi dan reproduksi formasi sosial. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang lebih berfokus terhadap pengkajian konsepsi ideologi dan negara dalam pemikiran Louis Althusser dan relevansinya dengan konteks Indonesia kontemporer. Adapun penelitian mengambil secara spesifik kondisi sosio-historis pada era |

| No. | Judul | Peneliti | Jenis Penelitian | Teori/Konsep | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|----------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | | Orde Baru, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengambil periode pasca-Orde Baru sebagai acuan relevansi. |
| 2. | The Sublime of Object of Ideology (Buku) | Slavoj Zizek | Kualitatif | Psikoanalisis Jacques Lacan, Filsafat Hegel, teori kelas, kebudayaan populer Marxisme. | Menjelaskan dengan analisis kritis dan perspektif konflik tentang bagaimana metode sublimasi ideologi kepada masyarakat luas. | Studi lebih berfokus menganalisis ideologi berdasarkan produk-produk kebudayaan seperti film, buku, pidato, cerpen, novel, dan lainnya. Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, yang lebih berfokus terhadap pengkajian pemikiran tokoh dengan konteks ideologi dan negara dalam suatu formasi sosial masyarakat lewat disiplin ilmu sosiologi. |
| 3. | The Ideology of Power and The Power of Ideology | Goran Therborn | Kualitatif | Interpelasi, kualifikasi, subjeksi, aparatus ideologis negara, Psikoanalisis Lacan, Diskursus, Negara dalam Perspektif Marxis | Membahas bagaimana konsep negara dan kekuasaan lewat praktik-praktik diskursus dominan dalam praktik sosial. | Penelitian ini lebih berfokus menghubungkan dan mengkritik konsepsi dalam bangunan pemikiran Louis Althusser, khususnya dalam konsep interpelasi dan subjeksi. Adapun penelitian berusaha menelaah kemunculan berbagai aparatus- |

| No. | Judul | Peneliti | Jenis Penelitian | Teori/Konsep | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---------------------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | | <p>aparatus baru di dunia hari ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus membedah pemikiran Louis Althusser tentang ideologi dan negara berdasarkan keterkaitannya dengan mode produksi dan formasi sosial masyarakat Indonesia.</p> |
| 4. | Global Neoliberalism and Education and its Consequences (Buku) | Dave Hill dan Ravid Kumar | Kualitatif | Konsep globalisasi, modernitas cair, neoliberalisme, <i>late capitalism</i> , teori pendidikan Marxis | Membahas bagaimana praktik determinasi ideologis kelas atas yang terjadi hari ini terhadap praktik sosial lewat kebijakan, wacana, dan program penyesuaian pendidikan dengan industrialisasi. | <p>Penelitian ini lebih berfokus mengkaji bagaimana fenomena pendidikan hari ini yang disusupi kepentingan-kepentingan pasar bebas lewat berbagai agenda neoliberal. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus membedah konsep ideologi dan negara dalam formasi sosial masyarakat Indonesia, yang mana tidak terpaku kepada satu ISA saja.</p> |

| No. | Judul | Peneliti | Jenis Penelitian | Teori/Konsep | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|----------------|------------------|---|--|--|
| 5. | Analisis Interpretasi Elit Pendidikan Indonesia tentang Ideologi Pendidikan Nasional (Jurnal Nasional) | Karti Soeharto | Kualitatif | Teori Elit Pendidikan dari Robert D. Putnam dan teori ideologi pendidikan O'Neill | Membahas bagaimana keterkaitan ideologi dan aparatus ideologi negara dalam mempengaruhi formasi sosial masyarakat Indonesia. | Penelitian ini lebih berfokus kepada aparatus ideologi pendidikan dan bagaimana tipologi ideologi dalam ranah pendidikan Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus memahami ideologi dengan konteks negara, dan mengkajinya lewat studi pemikiran. |
| 6. | Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komperhensif atau Konsepsi Politis? (Jurnal Nasional) | Agus Wahyudi | Kualitatif | Analisis wacana, teori hukum natural, dan teori kontrak sosial | Menelaah secara interpretatif bagaimana bentuk, proses, dan makna ideologi berdasarkan praktik sosial yang ada. | Penelitian ini lebih berfokus mengkaji pandangan tokoh terhadap Pancasila sebagai objek interpretatif dan gambaran kondisi sosial dari berbagai periode pemerintahan di Indonesia (Orde Lama dan Orde Baru). Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yang lebih berfokus terhadap pengkajian pemikiran tokoh dan relevansinya dengan konteks kontemporer. |

| No. | Judul | Peneliti | Jenis Penelitian | Teori/Konsep | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|-------------|------------------|---|--|--|
| 7. | Corporate Social Responsibility (CSR), Ideologi, dan Keberpahaman di Indonesia: Telaah Teori Kritis Mazhab Frankfurt (Jurnal Nasional) | Abdul Kodir | Kualitatif | Konsep CSR, Civil Society, Teori Kritis | Menelaah secara kritis fungsi institusi sosial sebagai salah satu aparatus ideologis negara untuk melegitimasi formasi sosial masyarakat lewat praktik represif-ideologis. | Penelitian ini lebih berfokus mengkritik fungsi dan peran dari CSR-CSR yang ada di Indonesia, sebagai salah satu wujud praktik aparatus ideologis negara yang melakukan pendekatan kepada masyarakat, lewat teori kritis Frankfurt. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus menelaah konsepsi ideologi dan negara dalam perspektif Althusser. Adapun penelitian juga menjelaskan adanya aparatus komunikasi yang juga berpengaruh penting dalam pembentukan formasi sosial masyarakat. |

| No. | Judul | Peneliti | Jenis Penelitian | Teori/Konsep | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|----------------------------|------------------|--|---|---|
| 8. | Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective (Jurnal Internasional) | Benedict Anderson | Kualitatif | Formasi Sosial, teori ideologi, teori aparatus ideologis negara | Penelitian ini menggunakan konsep aparatus negara dalam menjelaskan proses pembentukan formasi sosial masyarakat Indonesia. | Penelitian lebih berfokus terhadap model determinasi ideologis dan formasi sosial yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sosial Negara Indonesia dari era pra-kemerdekaan hingga Orde Baru. Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, yang lebih berfokus terhadap pengkajian membedah konsep ideologi dan negara dalam pemikiran tokoh, dan relevansinya dengan konteks kontemporer. |
| 9. | The Haunted University: Academic Subjectivity in The Time of Communicative Capitalism (Tesis) | Catherine Elizabeth Thomas | Kualitatif | Psikoanalisis Jacques Lacan, Psikoanalisis Freud, dan aparatus ideologis negara Louis Althusser. | Membahas bagaimana universitas menjadi aparatus yang digunakan untuk memproduksi formasi sosial. | Penelitian lebih berfokus untuk menjelaskan pengaruh ISA pendidikan negara dalam merealisasikan agenda teknokultural di tengah masyarakat. Adapun penelitian ini menjelaskan latar belakang historis budaya akademik di Negara Inggris. Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yang lebih berfokus mengkaji konsep ideologi dan negara |

| No. | Judul | Peneliti | Jenis Penelitian | Teori/Konsep | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|-----------------------|------------------|--|--|---|
| | | | | | | serta pengaruhnya dalam formasi sosial masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru. |
| 10. | Inside the Teaching Machine: The United States Public Research University, Surplus Value, and the Political Economy of Globalization (Disertasi) | Catherine Jean Chaput | Kualitatif | Negara dalam perspektif Marxis, Kekuasaan, ideologi, aparatus ideologis negara, hegemoni, dan pendidikan kritis. | Pengaruh determinasi aparatus ideologi pendidikan terhadap proses reproduksi formasi sosial. | Penelitian lebih spesifik membahas bagaimana universitas sebagai ISA pendidikan dapat menciptakan determinasi-ideologis lewat riset dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Adapun penelitian lebih befokus menggali dimensi historistias terjadinya fenomena ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus mengkaji konsepsi ideologi dan negara secara mendalam dalam pemikiran tokoh lewat disiplin ilmu sosiologi, dan relevansinya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer. |

Sumber: Analisis Peneliti (2019)

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Sosiologi Pengetahuan

Sosiologi pengetahuan merupakan salah satu sub-disiplin sosiologi yang mengkaji hubungan pengetahuan dalam suatu proses sosial. Terminologi “sosiologi pengetahuan” sendiri digunakan pertama kali pada awal 90-an oleh seorang filsuf Jerman bernama Max Scheler.³⁶ Sub-disiplin ini awalnya digunakan oleh para ilmuwan untuk meneliti pembentukan pemikiran masyarakat pada era perang dunia. Namun karena adanya keberlanjutan perkembangan pengetahuan dan pola kehidupan masyarakat, metode ini mulai digunakan secara lebih luas dan spesifik dalam berbagai penelitian sosial.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, sosiologi pengetahuan bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu “pengetahuan” dapat dikonstruksikan menjadi “realita” atau “kenyataan” dalam masyarakat.³⁷ Dua poin ini menjadi konsep dasar dari sosiologi pengetahuan. Apa yang dimaksud sebagai “kenyataan” adalah fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan). Sedangkan “pengetahuan” adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik. Kenyataan dipahami sebagai bentuk realitas subjektif masyarakat, dimana masyarakat

³⁶ Peter L. Berger, dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (London: Penguin Books, 1991), hal. 18.

³⁷ *Ibid.*

menggunakan mekanisme penafsirannya atau interpretasi masing-masing akan keadaan sosial yang dihadapi. Sedangkan pengetahuan adalah makna atau substansi yang menjadi objek pengetahuan itu sendiri.

Apa yang disebut pengetahuan merupakan konstruksi sosial masyarakat. Pengetahuan tidak berfungsi secara otonom, karena relasi yang ada di dalam pengetahuan mempunyai keterkaitan penting dengan relasi sosial yang ada di masyarakat. Pengetahuan menghubungkan kehidupan antara entitas masyarakat satu dan lainnya ini dengan diformulasikannya varian-varian pengetahuan ke dalam sistematisasi berpikir.

Dalam implementasinya, sosiologi pengetahuan tidak hanya ditujukan untuk mengetahui bentuk pengetahuan seperti apa yang divalidasi dalam suatu masyarakat, namun juga menelaah secara spesifik bagaimana proses pelebagaan pengetahuan tersebut. Karena konstruksi realitas setiap individu dan masyarakat berbeda-beda, maka pengetahuan harus dikaji secara signifikan. Baik itu melalui kandungan pengetahuan berdasarkan interpretasi subjektif aktor sosial, atau objektivitasnya dalam realitas hidup masyarakat. Sehingga sosiologi pengetahuan harus dapat mengetahui secara mendalam latar belakang historis, ciri, perbedaan, persamaan, bentuk, sebab, dampak, hingga tujuan pengetahuan dilegitimasi dan berfungsi di dalam masyarakat.

Dalam konstruksi pengetahuan masyarakat terhadap realita, terdapat 3 tahap pelebagaan pengetahuan (institusionalisasi) yang bersifat dialektis, yaitu: objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Objektivasi merupakan proses

pelembagaan pengetahuan yang ingin diterapkan pada lingkungan sosial di dalam dunia objek. Internalisasi merupakan proses refleksi diri yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan sosial masyarakat terhadap pengetahuan yang telah diobjektifikasi secara subjektif. Sedangkan eksternalisasi merupakan proses *output* pengetahuan yang telah diafirmasi ke dalam realita kehidupan.

1.7.2. Ideologi

Secara etimologis, ideologi berasal dari serapan bahasa Prancis (*idéologie*) yang terdiri dari penggabungan dua kata, yaitu: *idéo* yang artinya ide, pikiran, pandangan dan *logie* yang artinya logika atau rasio. Pada abad 18, filsuf dari Prancis bernama Destutt de Tracy menciptakan kata ini yang maknanya adalah “sains tentang ide”, sebuah studi terhadap kumpulan gagasan dan ide yang saat ini tidak dapat kita pelajari, kecuali kita gunakan ilmu filsafat atau psikologi sebagai representatifnya.³⁸ Menurut Alstair C. MacIntyre, setidaknya ada tiga tampilan kunci dari ideologi; pertama, bahwa ideologi menggambarkan karakteristik-karakteristik umum tertentu alam dan masyarakat dari dunia yang sedang berubah dan dapat ditelaah secara empiris. Kedua, ideologi sebagai evaluasi yang mana adanya perhitungan tentang hubungan antara apa yang dilakukan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ketiga, ideologi sebagai eksistensi sosial yang tidak hanya dipercayai oleh anggota-anggota kelompok sosial tertentu, melainkan diyakini sebagai syarat yang mencirikan kehidupan

³⁸ Teun A. van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach*, *Op.Cit.*, hal. 2.

kelompok sosial yang ada.³⁹ Ideologi memiliki bentuk yang abstrak, namun ditujukan untuk membentuk dan memahami suatu hubungan yang konkrit.

Dalam penjelasan Terry Eagleton, setidaknya ada 16 definisi tentang ideologi dari zaman klasik hingga postmodernisme, yaitu: 1) proses produksi makna, tanda, dan nilai dalam kehidupan sosial, 2) kesatuan karakteristik gagasan yang bersifat partikuler oleh kelompok sosial atau kelas tertentu, 3) ide-ide yang membantu pelegitimasi kekuatan politik dominan, 4) komunikasi yang terdistorsi secara sistematis, 5) pembentukan subjek, 6) bentuk-bentuk pemikiran yang dimotivasi oleh kepentingan sosial, 7) rasionalisasi identitas, 8) ilusi sosial yang diperlukan, 9) konjungtur dari wacana dan kekuasaan, 10) medium dimana aktor-aktor sosial memahami dunia mereka, 11) serangkaian tindakan yang berorientasi pada keyakinan, 12) kekeliruan realita linguistik dan fenomenal, 13) penghentian semiotik, 14) medium yang diperlukan berbagai individu untuk membentuk struktur sosial, 15) medium yang diperlukan berbagai individu untuk membentuk struktur sosial, 16) proses dimana kehidupan sosial dinaturalisasi.⁴⁰

Di dalam ilmu sosial, ideologi memberikan perhatian yang luas terhadap korelasinya dengan kelas, kelompok dominan, gerakan sosial, kekuasaan, ekonomi-politik, dan yang banyak diperbincangkan sekarang; gender dan kebudayaan.⁴¹

³⁹ William F. O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), terj Omi Intan Naomi, hal. 32.

⁴⁰ Terry Eagleton, *Ideology: An Introduction*, (London: Verso, 1991), hal. 1-2.

⁴¹ Teun A. van Dijk, *Op. Cit.*, hal. viii.

Ideologi selalu ada, selama relasi dan insitusalisasi sosial dalam kehidupan manusia berjalan.

Apa yang dimaknai ideologi dalam penelitian ini bukan ideologi dalam paradig ilmu politik atau definisi politis. Ideologi sebagaimana yang dimaknai Althusser adalah sebuah representasi ide atau gagasan kelas atas melalui praktik-praktik sosial yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial di dalam suatu negara. Adapun ideologi dalam pemaknaan Althusser tidak direduksi ke dalam wacana atau pembahasan semantis, melainkan lebih ke dalam meneropong konstruksi realitas dalam suatu praktik sosial yang spesifik, atau periode historis tertentu (*practical ideology*)

1.7.3. Formasi Sosial

Formasi sosial merupakan salah satu konsepsi Marxis yang digunakan untuk menjelaskan bentuk spesifik atau konkrit masyarakat berdasarkan kompleksitas mode-mode produksi yang terdiri oleh 2 ketentuan utama produksi, yaitu: relasi produksi (hubungan antar agen produksi) dan kekuatan produksi (alat, materiil, dan pengetahuan).⁴² Dalam suatu periode historis, selalu terdapat suatu mode produksi utama atau dominan yang menguasai mode-mode produksi lainnya, dan menjadi *grand design* dari sistem perekonomian. Contohnya seperti masyarakat feodal yang menjalankan sistem agraris, masyarakat kapitalis yang menjalankan sistem perindustrian, ataupun masyarakat komunal yang menjalankan mode produksi berburu.

⁴² Karl Marx, *Op. Cit.*, hal. 12.

Setiap formasi sosial selalu mempunyai relasi produksi yang dominatif, seperti buruh dan pemilik modal, budak dan tuan, atau petani dan tuan tanah.

1.7.4. Negara dalam Perspektif Marxis

Dalam perspektif Marxis, negara selalu dipandang sebagai alat represifitas (*repressive state*) kelas dominan yang menggunakan mekanisme kekerasan untuk melegitimasi kekuasaannya. Franz Magnis menjelaskan bahwa negara menurut Marx merupakan “negara kelas”, yang artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas yang menguasai bidang ekonomi.⁴³ Melalui topografi basis-suprastruktur, Marx telah menjelaskan; bahwa struktur sosial masyarakat merupakan hasil dari aktivitas produksi secara riil. Dengan artian, semua tatanan sosial yang ada ditentukan oleh kondisi ekonomi yang berjalan. Konflik kelas yang terjadi di dalam rantai perekonomian membuat negara juga menjadi perwujudan organisme sosial yang kontradiktif. Esensi antagonisme kelas antara kelas bawah (yang terdominasi) dan kelas atas (dominan) dari relasi produksi ini, terlembagakan menjadi relasi-relasi sosial yang kontradiktif. Untuk dapat melegitimasi kondisi sosial tersebut, terdapat 3 peran penting negara dalam menerapkan kekuasaannya, yaitu melalui: represitas-ideologis, represifitas hukum, dan yurisdiksi pemerintah. Menurut Engels, negara bertujuan untuk mempertahankan syarat-syarat kehidupan dan kekuasaan kelas yang berkuasa terhadap

⁴³ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 125.

kelas yang dikuasai secara paksa.⁴⁴ Dengan itu, para penguasa negara atau elit politik juga dipandang sebagai bagian dari kelas atas.

Seiring terjadinya transformasi kehidupan manusia, tatanan demi tatanan terus berganti, dari bentuk kerajaan hingga yang kita kenal sebagai sekarang negara modern. Namun, proses tersebut tidak terjadi secara alamiah. Karena dari bentuk formasi sosial masyarakat purba hingga masyarakat sipil hari ini, perubahan selalu terjadi melalui konjungtur politik atau revolusi sosial yang menjadi titik kulminasi dari konflik antar kelas.

Untuk menciptakan tatanan sosial baru dibutuhkan upaya-upaya perombakkan terhadap tatanan-tatanan yang lama, contohnya seperti revolusi industri, revolusi Prancis, ataupun revolusi kelas pekerja. Sehingga kelas mana yang memegang kuasa di dalam negara, mereka lah yang dapat memproduksi atau melegitimasi “konstruksi realitas” masyarakat. Makna “konstruksi” menandakan, bahwa di dalam negara selalu ada pula upaya segregasi dan institusionalisasi makna hidup masyarakat. Hal tersebut membuat negara mempunyai kewenangan untuk merepresentasikan kepentingan kelas dalam wujud kepentingan umum (*common interest*).

Terdapat dua unsur yang selalu melekat pada negara dalam menjalankan fungsinya, yaitu: kekuasaan (*power*) dan aparatus negara (*apparatuses*). Walaupun notabene analisis Marxis menganggap mekanisme represifitas dan adanya kekuasaan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 126.

yang dimiliki negara untuk menertibkan atau menjaga stabilitas politik, namun tidak semua setuju bahwa negara hanya menjalankan determinasi secara langsung ke ranah perekonomian, dan hanya negara dalam pemahaman tunggal yang dapat mereproduksi dominasi. Lenin misalnya yang menjelaskan perlawanan kelas pekerja harus dapat diorganisasikan melalui partai yang merepresentasikan kepentingan mereka, atau partai komunis. Wujud otoriter negara yang dijalankan atas dasar watak kelas penguasa sebelumnya harus dirubah menjadi diktator proletariat. Sehingga setelah revolusi sosial berlangsung, tumbuh kekuatan politik baru di dalam negara. Adapun formula dari Antonio Gramsci yang memandang negara adalah hasil dari masyarakat politik dan masyarakat sipil, di mana masyarakat politik yang termasuk pula partai politik dan lembaga sosial mempunyai fungsi ganda; melegitimasi dominasi pada kelas pekerja dengan medium hegemoni, atau melakukan *counter hegemony* terhadap kelas penguasa.

Sedangkan dari Althusser tumbuh lah suatu pemahaman baru yang mencangkup serta menentang konsepsi para pendahulunya; bahwa semua institusi sosial hingga bagian kelompok sosial terkecil dari masyarakat sipil adalah aparatus negara yang dapat berperan pula menjadi kaki-tangan negara dalam mereproduksi ketimpangan kelas. Namun, sifat represif yang menjadi mekanisme kerja dari lembaga-lembaga negara ini yang membedakan mereka menjadi dua kategori, yaitu: aparatus represif negara (polisi, penjara, dan pengadilan) yang melakukan represifitas secara langsung (di mana konsekuensinya diketahui oleh masyarakat), dan aparatus ideologi

negara (media, keluarga, institusi keagamaan, dan lainnya) (yang melakukan represi secara tidak langsung lewat medium ideologi), yang ternyata lebih efektif dalam melanggengkan dominasi kelas.

1.8. Sistematika Penulisan

Penjelasan sistematika penulisan diperlukan untuk menghasilkan suatu penelitian. Hal tersebut bertujuan agar peneliti menjaga fokus tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun keperluan dari sistematika penelitian agar penelitian dapat lebih rinci dan memudahkan peneliti untuk memaparkan hasil penelitian. Selain itu sistematika penulisan juga dapat berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.

Di dalam penelitian ini, sistematika penelitian terdiri dari 5 BAB, yaitu **Bab I** merupakan suatu pedahuluan yang berguna untuk mengetahui gambaran besar dari penelitian. Bab ini terdiri dari 8 sub-bab, yaitu: 1) latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian, 2) rumusan masalah yang meliputi pertanyaan-pertanyaan penelitian, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, 5) tinjauan pustaka terkait penelitian sejenis yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang pernah mengkaji persoalan ideologi dan negara, 6) metodologi penelitian, 7) kerangka konseptual, dan 8) sistematika penulisan.

Bab II berisi penulisan naratif tentang Louis Althusser selaku tokoh yang pemikirannya akan dijadikan acuan dalam menelaah fenomena sosial dalam penelitian. Bab ini terdiri dari 5 sub-bab, yaitu: 1) pengantar, 2) jejak langkah kehidupan Louis

Althusser, 3) serat epistemologi dalam karya Althusser, 4) kondisi sosial-politik Althusser, dan 5) ringkasan.

Bab III berisi pengkajian secara terfokus dan mendalam terhadap konseptualisasi ideologi dan negara dari Louis Althusser, baik itu dari tesis atau pun argumennya yang berkorelasi dengan gejala sosial yang ingin dikaji. Bab ini terdiri dari 5 sub-bab, yaitu: 1) pengantar, 2) konstruksi sosial: relasi struktur dan agen dalam pandangan Althusser 3) konsep mode produksi dan formasi sosial, 4) negara dalam kacamata Althusser, dan 5) subjeksi dan kualifikasi: pembentukkan subjek rasional, dan 6) ringkasan.

Bab IV berisi pembahasan terkait hasil analisis peneliti yang merefleksikan dan mengkaji relevansi teori ideologi dari Louis Althusser dengan kondisi masyarakat Indonesia kontemporer. Bab ini terdiri dari 4 sub-bab yaitu: 1) pengantar, 2) formasi sosial masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru, 3) Peran dan fungsi aparatus ideologis negara, 4) pembentukkan tenaga kerja produktif Indonesia di abad 21, dan 5) ringkasan.

Sedangkan **Bab V** berisi kesimpulan, refleksi teoretis, refleksi praktiks, dan saran yang menjadi ringkasan menyeluruh dari hasil penelitian ini.